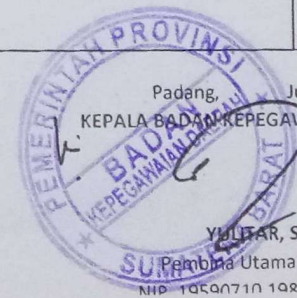


**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARU**

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIKAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Informasi terkait nilai Pemetaan potensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
2	Informasi PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
3	Informasi PNS yang sedang dalam permasalahan disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
4	Informasi terkait data pribadi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
5	Rekam Medik PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
6	Daftar nilai DP3 PNS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS pasal 6	1 Tahun	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
7	Data rencana penempatan CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
8	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan non struktural hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9	Soal-soal tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10	Surat Pertanggungjawaban Keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.	Tidak terbatas	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP - Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
x	IP/IP address private, bandwidth management, kode akses, DBMS, sistem keamanan	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (pasal 30) - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16) - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	- Penerobosan / penyalahgunaan hak akses - Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan - Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Menjaga / melindungi hak akses - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth - Menjaga keamanan jaringan komputer - Menjaga keamanan database



Padang, Juli 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

YULIAR, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19590710 198802 1 001